



## **Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal**

**Siti Nuraeni<sup>1</sup>, Nunung Nurhasanah<sup>2</sup>, Kosasih<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Singaperbangsa Karawang/Jl. HS. Ronggowaluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang/Indonesia

Email: [sitinuraenipemb@gmail.com](mailto:sitinuraenipemb@gmail.com)<sup>1</sup>, [nunungnurhasanah@feb.unsika.ac.id](mailto:nunungnurhasanah@feb.unsika.ac.id)<sup>2</sup>, [kosasih@staff.unsika.ac.id](mailto:kosasih@staff.unsika.ac.id)<sup>3</sup>

Citation: Nuraeni, S., Nurhasanah, N., & Kosasih. (2024). Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal. *Gorontalo Accounting Journal*, 7(2), 342–350. DOI: [10.32662/gaj.v7i2.3482](https://doi.org/10.32662/gaj.v7i2.3482)

### **Artikel info**

#### **Artikel history:**

Received: 02-05-2024

Revised: 09-06-2024

Accepted: 30-09-2024

**Abstract.** *Regional financial performance provides an overview of regional capacity in financial management. For six years, from 2018 to 2023, this research was conducted in Karawang Regency. The aim of this research is to determine and assess the influence of capital expenditure in Karawang Regency on the PAD Effectiveness Ratio and Regional Financial Independence Ratio from 2018 to 2023. One aspect of the methodology used in quantitative research is multiple linear regression testing. The research results show that the regional financial independence ratio influences the capital expenditure variable. The PAD effectiveness ratio has no influence on capital expenditure. Simultaneously, the regional financial independence ratio variable and the PAD Effectiveness Ratio variable influence capital expenditure.*

**Abstrak.** Kinerja keuangan daerah memberikan gambaran tentang kapasitas daerah dalam pengelolaan keuangan. Selama enam tahun, dari tahun 2018 sampai dengan 2023, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karawang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menilai pengaruh belanja modal di Kabupaten Karawang terhadap Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Salah satu aspek metodologi yang digunakan dalam penelitian kuantitatif adalah pengujian regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap variabel belanja modal. Rasio efektivitas PAD tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja modal. Secara simultan variabel rasio kemandirian keuangan daerah dan variabel Rasio Efektivitas PAD berpengaruh terhadap belanja modal.

#### **Keywords:**

*Regional Financial Independent Ratio;  
Ratio Original Income Effectiveness Ratio;  
Capital Expenditure*

#### **Corresponden author:**

Email: [kosasih@staff.unsika.ac.id](mailto:kosasih@staff.unsika.ac.id)

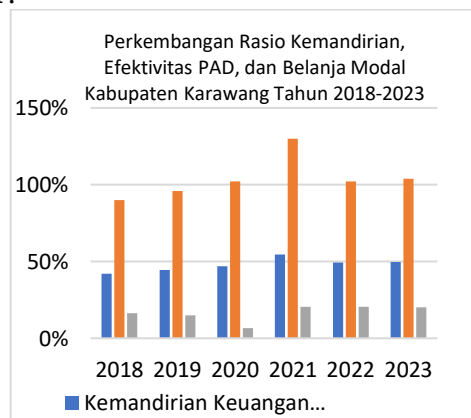
## Pendahuluan

Pemberian otonomi kepada daerah kabupaten/kota bertujuan untuk meningkatkan stabilitas politik dan kesatuan bangsa serta meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dengan adanya otonomi daerah, masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Agar pembangunan yang dilakukan sejalan dengan pengetahuan dan karakter masyarakat setempat, otonomi daerah dapat melestarikan dan meningkatkan identitas dan budaya lokal.

Wewenang untuk mengendalikan dan mengawasi urusan pemerintahan serta kesejahteraan penduduk di dalam wilayahnya diberikan kepada pemerintah daerah. Kebijakan ini dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup hak atas pemerintahan, peraturan daerah, dan pengelolaan keuangan daerah. Untuk mencapai target pembangunan dalam satu tahun, semua pendapatan atau penerimaan dan pengeluaran pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dicakup dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebuah rencana kerja pemerintah daerah. Melalui peraturan perundang-undangan yang dikenal sebagai Peraturan Daerah, DPRD mengesahkan satuan moneter ini (Badrudin, 2017).

Salah satu cara pemerintah pusat bertanggung jawab dalam mengelola proses otonomi daerah adalah dengan adanya dana perimbangan dalam proses tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun menerapkan sistem otonomi daerah, sistem ini tetap merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, dana perimbangan yang terlalu tinggi akan menimbulkan kesan bahwa daerah tersebut tidak memiliki kemandirian anggaran. Tingkat kemandirian keuangan di suatu daerah ditunjukkan oleh rasio dana perimbangan terhadap pendapatan daerah.

Tiga bentuk pendapatan daerah yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD yang rendah dapat mengakibatkan keterbatasan dana untuk pembiayaan program dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Hal ini dapat membatasi kapasitas pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jika PAD rendah, pemerintah daerah mungkin harus lebih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Ketergantungan ini dapat membuat daerah lebih rentan terhadap fluktuasi kebijakan nasional atau penurunan dana transfer.



Gambar 1. Perkembangan Rasio Kemandirian, Efektivitas PAD, dan Belanja Modal Kabupaten Karawang

Grafik tersebut menunjukkan evolusi belanja modal, rasio efektivitas, dan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Karawang untuk tahun 2018–2023. Rasio kemerdekaan akan rata-rata 48% antara 2018 dan 2023. Pada tahun 2021, rasio independensi akan naik menjadi 55%. Rata-rata rasio efektivitas PAD untuk Kabupaten Karawang antara tahun 2018 dan 2023 adalah 104%. Pada tahun 2021, persentase terbesar tercatat 130 persen. Alokasi belanja modal Kabupaten Karawang naik dari 6,6% pada tahun 2020 menjadi 20,4% pada tahun 2021, kenaikan yang cukup besar. Rata-rata belanja modal Kabupaten Karawang dari tahun 2018 hingga 2023. Selain itu, pada penelitian (Sylvia, David, & Winston, 2015) Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja. Tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Zainul & Mega, 2022) (Nadya, Taufiq, & Yulianti, 2016) Rasio kemandirian tidak memiliki pengaruh bagi belanja modal. Penelitian (Nadya, Taufiq, & Yulianti, 2016) variabel Efektivitas PAD berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Namun, penelitian (Annisa, Nelly, & Nurhasanah, 2022) menyatakan rasio efektivitas PAD tidak memiliki keterkaitan ataupun dampak bagi alokasi belanja modal.

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif verifikatif. Menurut (Sugiyono, 2019) Penelitian kuantitatif didefinisikan sebagai pendekatan penelitian berbasis positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, mengumpulkan data dengan menggunakan instrumen penelitian, dan menganalisis data kuantitatif dan statistik untuk menilai hipotesis yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut (Sugiyono, 2019) Penelitian deskriptif didefinisikan sebagai penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan dengan variabel yang lain atau membuat kesimpulan yang berlaku untuk variabel yang digunakan.

Data yang digunakan bersumber dari data sekunder (portal DJPK Kemenkeu RI). Data meliputi laporan keuangan Kabupaten Karawang Tahun 2018-2023. Proses analisis menggunakan *software* Minitab. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda dengan pengujian hipotesis secara parsial dan simultan.

Tabel. 1 Instrumen Penelitian

No	Variabel	Indikator	Skala
1.	<b>Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X1)</b>	$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$ (Mahmudi, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Ketiga, 2016)	<b>Rasio</b>
2.	<b>Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X2)</b>	$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$ (Mahmudi, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Ketiga, 2016)	<b>Rasio</b>
3.	<b>Belanja Modal (Y)</b>	$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$ (Hidayat, 2013)	<b>Rasio</b>

## Hasil Dan Pembahasan

### Analisis Kinerja Keuangan

#### Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah diukur dengan membandingkan PAD dan transfer pendapatan pusat dan provinsi.

Tabel 2. Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018-2023

Tahun	Realisasi PAD (m)	Target PAD (m)	Rasio (%)
2018	Rp1.169,57	Rp1.298,97	90%
2019	Rp1.356,32	Rp1.414,41	96%
2020	Rp1.303,35	Rp1.273,81	102%
2021	Rp1.651,85	Rp1.271,02	130%
2022	Rp1.561,87	Rp1.527,07	102%
2023	Rp1.696,26	Rp1.631,51	104%

Sumber: Data diolah, 2024

Memperhatikan tabel 2, rata-rata rasio kemandirian keuangan Kabupaten Karawang periode 6 tahun ialah 48 persen, masih dalam kategori kemampuan keuangan rendah. Kontribusi pendapatan transfer pusat dan provinsi masih lebih besar dibandingkan dengan PAD yang dimiliki Kabupaten Karawang. Dengan demikian Kabupaten Karawang masih bergantung kepada dana transfer pusat dan provinsi.

#### Rasio Efektivitas PAD

Tabel 3. Efektivitas PAD Kabupaten Karawang Tahun 2018-2023

Tahun	Realisasi PAD (m)	Transfer Pendapatan Pusat dan PemProv (m)	Rasio (%)
2018	Rp1.169,57	Rp2.777,41	42%
2019	Rp1.356,32	Rp3.055,53	44%
2020	Rp1.303,35	Rp2.786,29	47%
2021	Rp1.651,85	Rp3.029,85	55%
2022	Rp1.561,87	Rp3.171,15	49%
2023	Rp1.696,26	Rp3.425,55	50%

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 3 menggambarkan perkembangan dari rasio efektivitas PAD kabupaten Karawang dengan rata-rata 104 persen maka termasuk kategori efektif. Realisasi PAD tahun 2021 meningkat signifikan dengan rasio efektivitas PAD 130 persen. Mulai tahun 2020 Kabupaten Karawang sudah mencapai efektivitas PAD dengan kategori efektif.

#### Rasio Belanja Modal

Rasio belanja modal didapatkan dengan cara membandingkan belanja modal dengan total belanja.

Tabel 4. Rasio Belanja Modal Kabupaten Karawang Tahun 2018-2023

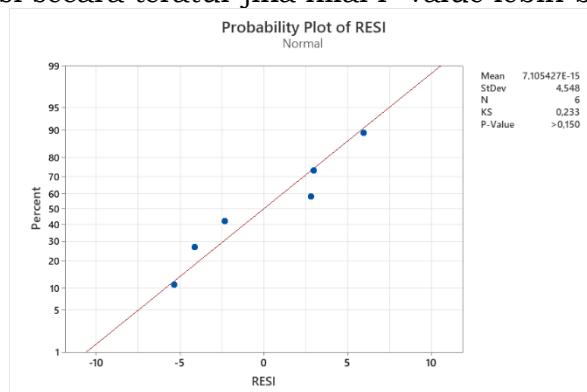
Tahun	Belanja Modal (m)	Belanja (m)	Rasio (%)
2018	Rp697,60	Rp4.315,27	16%
2019	Rp703,20	Rp4.672,95	15%
2020	Rp277,22	Rp4.169,18	7%
2021	Rp955,60	Rp4.670,67	20%
2022	Rp993,71	Rp4.806,74	21%
2023	Rp1.052,58	Rp5.203,61	20%

Sumber: Data diolah, 2024

Pada table 4 dapat diketahui bahwa selama tahun 208-2023 Kabupaten Karawang sudah menyentuh rasio belanja modal sebesar 20 persen. Rata-rata belanja modal Kabupaten Karawang Tahun 2018-2023 adalah 17 persen masih dalam kataegori rendah.

### Uji Normalitas

Untuk memastikan apakah residual terdistribusi secara teratur atau tidak, digunakan Uji Normalitas. Uji Kolmogrov Smirnov adalah teknik yang digunakan. Residual terdistribusi secara teratur jika nilai P-value lebih besar dari nol.



Gambar 2. Uji Normalitas

Berdasarkan gambar diatas,  $P\text{-value} > 0,150$ , maka dapat disimpulkan residual berdistribusi normal.

### Uji Multikolinearitas

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk mengetahui apakah data menunjukkan adanya korelasi atau tidak antara variabel independen. Nilai VIF digunakan dalam pengujian. Multikolinearitas terjadi apabila nilai VIF lebih dari 10.

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

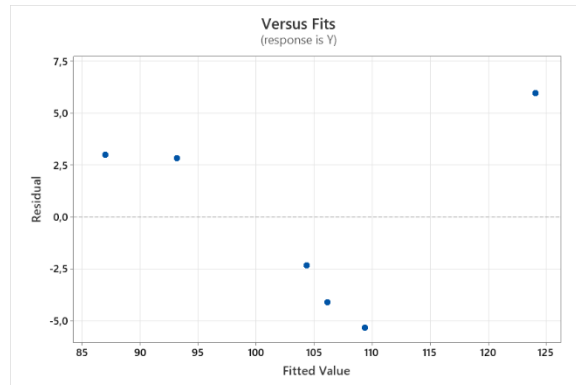
Term	Coefficients				
	Coef	SE Coef	T-Value	P-Value	VIF
Constant	-31,7	27,6	-1,15	0,334	
X1	2,938	0,636	4,62	0,019	1,25
X2	-0,292	0,561	-0,52	0,639	1,25

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 5 nilai VIF untuk variabel X1 dan X2 bernilai 1,25. Karena nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas pada variabel bebas tersebut.

**Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah terdapat kesamaan varian antar residual.



Gambar 3. Uji Heteroskedastisitas

Penyebaran titik-titik pada gambar di atas tidak menunjukkan pola yang jelas, yang mengindikasikan bahwa residual tidak mengalami heteroskedastisitas.

**Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi berfungsi untuk menguji apakah terdapat korelasi antar residual. Untuk menguji autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson. Bila nilai Durbin-Watson diantara dU dan 4dU maka tidak ada autkorelasi. Dengan n=6 dan k=2 diperoleh dU=1,8964 dan 4-dU=2,1036.

Tabel 6. Uji Autokorelasi

<b>Durbin-Watson Statistic</b>	
Durbin-	1,91788
Watson	
Statistic =	

Sumber: Data diolah, 2024

Nilai Durbin-Watson, seperti yang terlihat pada tabel sebelumnya, adalah 1,91788. Karena hasil ini berada di antara dU dan 4-dU, maka dapat dikatakan bahwa residual tidak berkorelasi.

Setiap uji asumsi klasik telah dilalui. Data kemudian dilakukan analisis regresi berganda untuk menentukan apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji regresi berganda menghasilkan temuan-temuan sebagai berikut.

Tabel 7. Uji Regresi Berganda

<b>Coefficients</b>					
<b>Term</b>	<b>Coef</b>	<b>SE Coef</b>	<b>T-Value</b>	<b>P-Value</b>	<b>VIF</b>
Constant	-31,7	27,6	-1,15	0,334	
X1	2,938	0,636	4,62	0,019	1,25
X2	-0,292	0,561	-0,52	0,639	1,25

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh model regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = -31,7 + 2,938X1 - 0,292X2 + e$$

Konstanta senilai -31,7, berarti jika Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X1) dan Rasio Efektivitas PAD (X2) bernilai 0, maka Belanja Modal (Y) bernilai -31,7. Koefisien variabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X1) sebesar 2,938 dan bernilai positif (ada perubahan searah). Hal ini berarti jika variabel bebas lainnya tetap atau 0 dan variabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X1) mengalami kenaikan sebesar 1% maka nilai variabel Belanja Modal (Y) mengalami kenaikan sebesar 2,938%. Koefisien variabel Rasio Efektivitas PAD (X2) sebesar -0,292 dan bernilai negatif (ada perubahan berlawanan arah). Hal ini berarti jika variabel bebas lainnya bernilai tetap atau 0 dan variabel Rasio Efektivitas PAD (X2) mengalami kenaikan 1%, maka nilai variabel Belanja Modal (Y) sebesar 0,292%.

### Koefisien Determinasi

Tabel 8. Uji R  
**Model Summary**

<b>S</b>	<b>R-sq</b>	<b>R-sq(adj)</b>	<b>R-sq(pred)</b>
5,87122	89,05%	81,74%	0,00%

Sumber: Data diolah, 2024

Mencermati tabel 8, terlihat bahwa nilai R-Sq(adj) sebesar 81,74%, artinya variabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X1) dan Rasio Efektivitas PAD (X2) mampu menjelaskan sebesar 81,74% dari variasi Belanja Modal (Y). Sedangkan faktor-faktor yang tidak dimasukkan dalam model yang diteliti menjelaskan 18,26% sisanya.

### Uji F

Pengaruh simultan variabel dependen dari faktor-faktor independen adalah apa yang ingin diukur oleh uji F. Semua faktor independen dianggap secara signifikan mempengaruhi variabel dependen jika nilai p-value kurang dari 0,05.

Tabel 9. Uji F

### Analysis of Variance

<b>Source</b>	<b>DF</b>	<b>Adj SS</b>	<b>Adj MS</b>	<b>F-Value</b>	<b>P-Value</b>
Regression	2	840,586	420,293	12,19	0,036
X1	1	735,859	735,859	21,35	0,019
X2	1	9,348	9,348	0,27	0,639
Error	3	103,414	34,471		
Total	5	944,000			

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 9, nilai *p-value Regression* sebesar 0,036. Hal ini berarti *p-value* < 0,05, maka dapat disimpulkan variabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X1) dan variabel Rasio Efektivitas PAD (X2) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel Belanja Modal (Y).

### Uji t

Uji t mengukur dampak masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah. Jika nilai p-value kurang dari 0,05, maka variabel independen dianggap memiliki dampak yang signifikan.

Tabel 10. Uji t  
Coefficients

<b>Term</b>	<b>Coef</b>	<b>SE Coef</b>	<b>T- Value</b>	<b>P- Value</b>	<b>VIF</b>
Constant	-31,7	27,6	-1,15	0,334	
X1	2,938	0,636	4,62	0,019	1,25
X2	-0,292	0,561	-0,52	0,639	1,25

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 10, nilai *p-value* untuk variabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X1) sebesar 0,019. Hal ini berarti *p-value* < 0,05, maka dapat disimpulkan variabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X1) berpengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Modal (Y). Adapun, nilai *p-value* untuk variabel Rasio Efektivitas PAD (X2) sebesar 0,639. Hal ini berarti *p-value* > 0,05, maka dapat disimpulkan variabel Rasio Efektivitas PAD (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Modal (Y).

### **Pembahasan**

#### **Pengaruh Kemandirian Sosial Terhadap Modal Belanja Secara Parsial**

Variabel kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa Jumlah uang yang dihabiskan untuk pegawai mempengaruhi pengeluaran daerah, yang pada gilirannya mempengaruhi stabilitas keuangan daerah. Pokok Bahasan Hal ini dapat menghambat laju pembangunan daerah, sehingga lebih sulit untuk mewujudkan aspirasi untuk mencapai kemandirian daerah yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Defitri, SY (2020) dan Bella, S. (2022) yang menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan,

#### **Pengaruh Efektifitas PAD Terhadap Modal Belanja Secara Parsial**

Variabel Rasio Efektivitas PAD tidak memiliki pengaruh terhadap modal belanja. Berdasarkan temuan ini, perolehan pendapatan daerah belum sesukses yang seharusnya dalam hal meningkatkan kinerja keuangan daerah. Orang dapat berargument bahwa kapasitas pemerintah daerah masih belum memadai, mencegah mereka mengambil keuntungan dari potensi mereka untuk menghasilkan pendapatan asli daerah yang nyata. Selain itu, efektivitas pendapatan asli daerah dapat langsung meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Penelitian ini sejalan dengan Ijtihad, R., & Harsono, I. (2024) yang menyatakan bahwa rasio efektifitas PAD Tidak Memiliki pengaruh terhadap modal belanja daerah.

#### **Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan variabel Rasio Efektivitas PAD terhadap variabel Belanja Modal Secara Simultan**

Kemandirian Keuangan daerah dan efektivitas PAD memiliki Pengaruh secara bersama-sama terhadap belanja modal. Hal ini membuktikan bahwa hal ini sejalan dengan Rakasiwi, F. (2024), Kusumaningrum, EB, & Sugiyanto, H. (2021) yang menyatakan bahwa kemandirian keyangan daerah dan rasio efektifitas PAD memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara simultan.

### **Kesimpulan Dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa belanja modal Kabupaten Karawang pada tahun 2018-2023 dipengaruhi oleh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Belanja Modal Kabupaten Karawang tahun

2018-2023 tidak dipengaruhi oleh Rasio Efektivitas PAD. Belanja Modal Kabupaten Karawang Tahun 2018-2023 Dipengaruhi Secara Simultan oleh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Efektivitas PAD.

Peneliti dapat memberikan rekomendasi yang diharapkan dalam penelitian selanjutnya dan dapat memasukkan variabel selain yang telah digunakan oleh peneliti yang memiliki efek negatif terhadap tenaga kerja keuangan.

### Daftar Pustaka

- Annisa, S. D., Nelly, M., & Nurhasanah. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. *Syntax Idea, Vol. 4, No. 6*, 981.
- Badrudin, R. (2017). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn.
- Bella, S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Transformasi Sintaks Jurnal*, 3(05), 675-683.
- Defitri, SY (2020). Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat). *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(2), 107-119.
- Halim, A. (2017). *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, Dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayat, M. (2013). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Feb Universitas Brawijaya*, 10.
- Ijtihad, R., & Harsono, I. (2024). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Dan Pengelolaan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Ganec Swara*, 18(1), 41-50.
- Kusumaningrum, EB, & Sugiyanto, H. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Stres Fiskal, dan Kepadatan Penduduk terhadap Alokasi Belanja Modal. *EKONOMI BISNIS*, 27(2), 630-643.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn.
- Mahmudi. (2019). *Buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Stim Ykpn.
- Nadya, A. D., Taufiq, M., & Yulianti, A. (2016). Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Di Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 14 (2)*, 69-78.
- Putra, W. (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok: Rajawali Pers.
- Rakasiwi, F. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Terhadap Efisiensi Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Bisnis dan Manajemen West Science*, 3(01), 98-107.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sylvia, F. G., David, S., & Winston, P. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan Kabupaten/ Kota Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Provinsi Sulawesi Utara. *Goodwill Journal Of Accounting And Auditing Research*, 27.
- Zainul, M., & Mega, T. H. (2022). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas, Dan Rasio Efisiensi, Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 – 2021. *Sibatik Journal*, 301.